

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Studio Perancangan Arsitektur 8.19 yang berjudul ADMIRALTY COURTHOUSE. Penulisan laporan ini dilaksanakan di semester genap tahun akademik 2014/2015 dan dilaksanakan di studio Tugas Akhir Program Studi Sarjana Arsitektur, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara. Hasil dari penulisan laporan yang telah diselesaikan yaitu berupa karya perancangan proyek arsitektur dengan judul 'ADMIRALTY COURTHOUSE'. Diharapkan proyek ini dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan ilmu arsitektur di kemudian hari.

Terselesaikannya laporan perancangan ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan yang didapatkan penulis oleh banyak pihak. Atas dasar hal ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Ir. Tri Harso Karyono, M.A. Ph. D. sebagai dosen pembimbing utama.
2. Doddy Yuono, S.T., M.T. sebagai dosen pembimbing pendamping.
3. Ir. Rudy Surya sebagai dosen koordinator Stupa 8.19.
4. Ir. Sutarki Sutisna sebagai dosen pembimbing.
5. Ir. Sutrisnowati Machdijar, M.T. sebagai dosen pembimbing.
6. Dosen - dosen tamu yang telah memberikan kuliah yang bermanfaat.
7. Kepala dan staff Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara yang telah membantu dan memberikan referensi buku.
8. Teman-teman di sekitar penulis yang telah memberikan saran.

Laporan perancangan ini belumlah sempurna, namun penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang memerlukannya.

Jakarta, 7 Juli 2015

Penulis

Abstrak

Indonesia merupakan negara maritim, dengan hamparan laut yang luas dan hasil laut yang melimpah. Keberadaan hasil laut yang melimpah ini pun membuat beberapa negara sekitar Indonesia ingin mencuri hasil laut negara Indonesia dengan cara menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa izin, maka pemerintah Indonesia pun segera mencegah hal ini semakin buruk dengan cara membentuk pengadilan perikanan dengan maksud untuk menangkap dan mengadili kasus – kasus illegal fishing yang ada. Namun fakta di lapangan berkata lain, kasus – kasus illegal fishing hanya berakhir dengan kapal nelayan asing yang ditenggelamkan ataupun dideportasinya sang pemilik kapal, hal ini pun memicu terulangnya kembali hal yang sama.

Perlu adanya perubahan dari sistem pengadilan perikanan yang ada saat ini, penuntasan kasus – kasus seperti ini pun akan berdampak berkurangnya percobaan pencurian hasil laut di wilayah perairan Indonesia. Pengadilan perikanan yang baru akan lebih tegas dalam menyelesaikan kasus – kasus yang ada dan pemberian sanksi sesuai dengan UU yang berlaku serta bisa menjadi pelopor bagi pengadilan – pengadilan perikanan lainnya untuk lebih tanggap dalam menindaklanjuti kasus – kasus illegal fishing lainnya.

Lokasi dari pengadilan perikanan yang baru atau pengadilan kelautan ini berada di dekat Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pelabuhan Muara Baru, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam penanganan kasus illegal fishing dan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Desain dari pengadilan perikanan yang baru ini pun akan tetap mengusung bentuk dari pengadilan perikanan di Indonesia namun akan dimodifikasi sehingga akan lebih terlihat modern dan megah.

Kata kunci : maritim, illegal fishing, pengadilan perikanan.

Abstract

Indonesia is a maritime country, with a vast expanse of sea and abundant marine products. The existence of this abundant marine products also makes several countries around Indonesia wants to steal from the state of Indonesia by way of fishing in Indonesian waters without permission, the Indonesian government immediately move to prevent it getting worse by creating a court of fisheries with a view to arrest and prosecute the cases of illegal fishing there. But the facts on the ground say otherwise, the

cases of illegal fishing just end up with foreign sinking or the deportation, this also triggers a recurrence of the same thing.

There needs to be a change from the existing court system fishery today, completion of cases like this will have an impact reduced attempted theft of marine products in Indonesian waters. The new fisheries courts will be more assertive in resolving the case of existing and sanctioning in accordance with applicable law and could be the precursor for other court of fisheries to be more responsive in following up on the case of illegal fishing.

The location of the new fisheries courts or maritime courts are located near Sunda Kelapa Harbor and Port of Muara Baru, it aims to facilitate the handling of cases of illegal fishing and violations in Indonesian waters. The design of this new fishery courts will still carry the form of fishing in Indonesian courts but will be modified so that it will look modern and magnificent.

Keywords: maritime, illegal fishing, fisheries courts.